

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
TEORI DAN HUKUM PERPAJAKAN	18B01225702	2	HUKUM TATA NEGARA	III
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset, dan Inovasi	
	Tanda Tangan Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.		Tanda Tangan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.	
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH				
S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila			
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa			
S4	Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman			
P2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum			
P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum			
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data			

KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum
KK3	Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis, berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan
KK8	Mampu memberi saran untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dituangkan dalam tulisan;
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR	
Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai secara filosofis teori dan konsep normatif tentang hukum perpajakan serta mampu mengambil keputusan dalam menerapkan kasus hukum perpajakan dalam bernegara dan berbangsa.	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
Mata kuliah ini mempelajari teori dan konsep normatif tentang hukum perpajakan serta hubungannya dengan pengelolaannya yang berujung pada ketaatan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta pelaksanaan wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pejabat pajak.	

Daftar Referensi:

1. Anshari Ritonga, 2017; Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia, Penerbit Pustaka El Manar, Cetakan Pertama, Jakarta.
2. Fidel, 2014; TAX LAW: Proses Beracara Di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Cetakan pertama, Penerbit PT. Carofin Media, Jakarta;
3. Muhammad Djafar Saidi, 2007; Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta.
4. Muhammad Djafar Saidi, 2018; Pembaruan Hukum Pajak, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima, Jakarta;
5. Y. Sri Pudyatmoko, 2007; Penegakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak, Penerbit Salemba Empat, Jakarta;
6. Y. Sri Pudyatmoko, 2015; Memahami Keadilan Di Bidang Pajak, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Pertemuan Ke-	Sasaran Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-2	Mahasiswa mampu memahami hukum perpajakan ke dalam hukum nasional sesuai teori kehendak negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori kehendak negara 2. Pengertian hukum perpajakan 3. Hukum perpajakan bukan hukum administrasi negara. 4. Fungsi hukum perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan 2. Kuliah Interaktif; 	Memiliki kemampuan mengungkapkan pendapatnya tentang hukum perpajakan ke dalam teori kehendak negara	
3	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum perpajakan sebagai hukum positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori hukum positif 2. Hukum perpajakan sebagai hukum positif 3. Hukum perpajakan sebagai substansi negara hukum . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Diskusi kelas 	Memiliki kemampuan mengungkapkan pendapatnya tentang hukum perpajakan sebagai hukum positif	5%
4	Mahasiswa mampu mengidentifikasi subjek hukum perpajakan yang terkait teori subjek hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori subjek hukum 2. Pengertian subjek hukum perpajakan 3. Ruanglingkup subjek hukum perpajakan 4. Wakil wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah Interaktif; 2. Pembuatan Makalah 	Memiliki kemampuan mengidentifikasi subjek hukum perpajakan terkait teori subjek hukum	5%
5	Mahasiswa mampu mengidentifikasi pembebanan pajak dengan mengaitkan teori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori keadilan 2. Pengertian pembebanan pajak 3. Ruanglingkup pembebanan pajak 4. Pembebanan pajak sebagai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Diskusi kelas 	Memiliki kemampuan mengidentifikasi pembebanan pajak dengan mengaitkan teori	5%

	keadilan	unsur keadilan bernegara		keadilan	
6	Mahasiswa mampu memahami teori pemungutan pajak dalam kaitan penyelenggaraan negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori pemungutan pajak. 2. Negara sebagai penyelenggara pemerintahan. 3. Tanggungjawab negara mewujudkan keadilan sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Pembuatan makalah 	Memiliki kemampuan memahami teori pemungutan pajak dalam kaitan penyelenggaraan negara.	10%
7-8	Mahasiswa mampu mengidentifikasi teori timbulnya utang pajak dalam praktiknya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori timbul utang pajak 2. Saat terjadi utang pajak 3. Hak mendahului negara 4. Berakhir utang pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah Interaktif 2. Diskusi kelas 	Memiliki kemampuan mengidentifikasi teori timbulnya utang pajak dalam praktiknya.	10%
9-10	Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi teori kewenangan dalam rangka penegakan hukum perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori kewenangan 2. Menerbitkan NPWP dan mengukuhkan pengusaha kena pajak 3. Menunjuk wakil wajib pajak 4. Penagihan pajak 5. Melakukan upaya paksa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah Interaktif 2. Pembuatan makalah 	Memiliki kemampuan mengetahui dan memahami teori kewenangan dalam kaitan peaksanaan hukum perpajakan	10%
11-12	Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi teori penegakan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori penegakan hukum. 2. Lembaga peradilan pajak 3. Penegakan hukum di luar lembaga peradilan pajak. 4. Penegakan hukum melalui lembaga peradilan pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Diskusi kelas 	Memiliki kemampuan mengetahui mengidentifikasi teori penegakan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa pajak.	10%

13-14	Mahasiswa mampu memahami teori perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori perlindungan hukum 2. Perlindungan hukum di luar lembaga peradilan pajak. 3. Perlindungan hukum melalui lembaga peradilan pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Pembuatan makalah 	Memiliki kemampuan memahami teori perlindungan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa pajak.	10%
15	Mahasiswa mampu memahami teori penerapan sanksi dalam hukum perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori penerapan sanksi 2. Sanksi administrasi perpajakan 3. Sanksi pidana perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Diskusi kelas 	Memiliki kemampuan memahami teori penerapan sanksi dalam hukum perpajakan	5%
16		Final test	Mengerjakan soal ujian		30%